

## BAB II

### Tinjauan Literatur

#### II.1 Pengindeksan Subjek

Upaya untuk melakukan pengorganisasian informasi mulai muncul sejak makin berkembangnya sumber-sumber informasi, pesatnya laju perkembangan teknologi informasi di awal tahun 1996 yang terus berlangsung sampai saat ini (tahun 2008) semakin memacu pesatnya arus informasi menjadi tak terkendali. Pembengkakan volume informasi yang dicetuskan, dipindahkan, dan diterima akan terus dan semakin menggelembung.<sup>9</sup> Seiring dengan itu, makna informasi pun meningkat. Kondisi ini berdampak pada tingginya kebutuhan manusia untuk dapat menemukan informasi yang sesuai keperluannya dengan cepat dan tepat. Oleh karena itu organisasi informasi menjadi hal yang sangat penting.

Organisasi informasi memiliki peranan yang amat penting bagi keseluruhan sistem administratif di perpustakaan, tanpa organisasi informasi, sangat mustahil bagi pengguna untuk dapat menemukan informasi yang diperlukannya dengan tepat dan cepat. Sekalipun dengan keajaiban teknologi internet.<sup>10</sup>

Fungsi utama setiap perpustakaan atau pusat informasi adalah mengadakan, mengolah, menyediakan dan menyebarkan informasi kepada para pemakai. Untuk melaksanakan fungsi tersebut maka perpustakaan harus mengolah dan mengatur

---

<sup>9</sup> Ardoni, Teknologi Informasi: Kesiapan Pustakawan Memanfaatkannya, USU, 2006.

<sup>10</sup> Fadaie Araghi, Gholamreza A New Scheme for Library Classification. *Cataloging & Classification Quarterly*, 38(2), 75-99. 2004

koleksinya sedemikian rupa sehingga informasi yang terdapat di dalamnya dapat disimpan dan ditemukan kembali secara mudah, cepat dan tepat jika diperlukan.<sup>11</sup> Dengan kata lain, di dalam perpustakaan diperlukan suatu sistem temu kembali informasi.<sup>12</sup>

Kerangka kerja organisasi informasi di perpustakaan berfokus pada proses pengorganisasian informasi (pada tahap masukan) dan pencarian kembali informasi (pada tahap luaran). Masukan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan, yaitu seluruh, bahan perpustakaan diorganisasir, diolah, dikatalog, diklasifikasi (analisis) yang menghasilkan susunan bahan pustaka di rak (susunan koleksi), dan wakil ringkas bahan pustaka yang berupa katalog, bibliografi, indeks, dll. Sedangkan keluaran adalah kegiatan temu kembali informasi oleh pemakai perpustakaan.

Kegiatan pengatalogan secara garis besar dapat dibagi ke dalam dua kegiatan:

1) Pengatalogan deskriptif, yang bertumpu pada fisik bahan pustaka (judul, pengarang, jumlah halaman, dll), kegiatannya berupa membuat deskripsi bibliografi, menentukan tajuk entri utama dan tambahan, pedomannya antara lain AACR dan ISBD; dan 2) Pengindeksan subyek, yang berdasar pada isi bahan pustaka (subyek atau topik yang dibahas), mengadakan analisis subyek dan menentukan notasi

---

<sup>11</sup> Miswan, Klasifikasi dan katalogisasi : sebuah pengantar, Workshop perpustakaan dan kearsipan, 2003

<sup>12</sup> Istilah temu kembali informasi (*information retrieval*) diperkenalkan oleh Mooers pada tahun 1951. Dia juga memperkenalkan “bahasa temu kembali informasi” (*information retrieval language*) sebagai istilah umum untuk menyebut bagan klasifikasi, kata kunci dan sistem temu kembali berbasis teks bebas.

Elemen utama dalam temu kembali informasi adalah interaksi pengguna dengan pangkalan data (atau lingkungan informasi seperti *world wide web*). Pengguna memiliki permintaan (*query*) yang sebisa mungkin tepat (*match*) dengan titik akses yang telah dirancang sebelumnya.

klasifikasi, pedomannya antara lain bagan klasifikasi, daftar tajuk subyek dan tesaurus.

Pengindeksan subjek (baik pengindeksan pralaras maupun pascalaras) mencakup analisis terhadap isi dokumen sehingga diketahui dokumen tersebut berbicara tentang apa, proses ini terbagi dalam dua tahap yaitu analisis konseptual dan penerjemahan hasil analisis konseptual ke dalam bahasa Indeks.

Penerjemahan dengan menggunakan bahasa indeks bertujuan untuk: 1). Memungkinkan pengindeks menyatakan subyek secara konsisten dan taat azas sehingga konsep yang sama diwakili dengan istilah yang sama pula, dan 2). Memungkinkan perluasan dan penyempitan ruang lingkup pencarian dengan memperlihatkan hubungan-hubungan semantik antara istilah-istilah bahasa indeks tersebut.<sup>13</sup>

Bahasa Indeks terbagi kedalam dua jenis, yaitu verbal dan non-verbal, dalam bahasa indeks non-verbal, hasil analisis konseptual diterjemahkan dalam bentuk notasi (berupa angka, abjad, atau kombinasi antara abjad dan angka), bahasa indeks ini disusun dalam bentuk bagan klasifikasi. Sedangkan bahasa indeks verbal menyatakan hasil analisis konseptual diterjemahkan dengan menggunakan kosakata terkendali, biasanya berbentuk daftar tajuk subjek atau tesaurus.

Tesaurus memiliki kemiripan dengan daftar tajuk subjek, namun terdapat beberapa perbedaan karena tesaurus merupakan bahasa indeks yang digunakan untuk

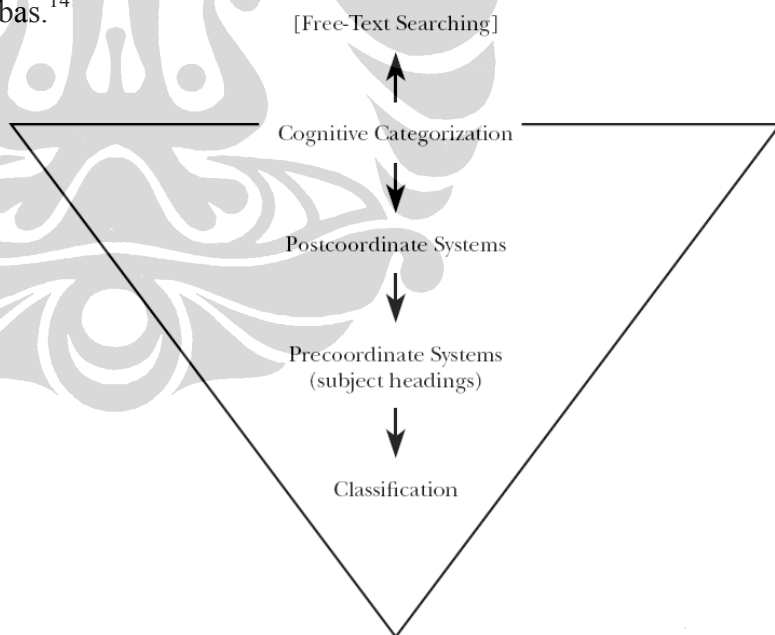
---

<sup>13</sup> Lancater, F. Wilfrid "Vocabulary control in information retrieval systems". *Advances in Librarianship*. Vol 7. New York: Wiley. 1977

sistem pengindeksan pascalaras, sedangkan untuk sistem pengindeksan pralaras, bahasa indeks yang digunakan adalah daftar tajuk subjek. Selain itu, hubungan antar deskriptor diperlihatkan dengan menggunakan singkatan. Perbedaan lainnya adalah tesaurus hanya mendaftarkan istilah-istilah untuk satu bidang tertentu saja, berbeda dengan daftar tajuk subyek yang mencakup istilah-istilah berbagai bidang secara umum.

## II.2 Pendekatan Informasi

Terdapat empat pendekatan utama dalam organisasi sistem simpan dan temu kembali informasi yaitu, Klasifikasi, Pengindeksan Prakoordinasi, Pascakoordinasi dan penelusuran teks bebas.<sup>14</sup>



**Gambar 3.** Diagram empat pendekatan utama dalam organisasi sistem simpan dan temu kembali informasi oleh Elin K. Jacob

<sup>14</sup> Elin K. Jacob, Classification and Categorization : A Difference that Makes a Difference. library trends: 2004 hal. 19

Dari empat pendekatan utama, penelusuran teks bebas merupakan metode yang paling mudah digunakan dalam melakukan penelusuran. Namun penelusuran teks bebas memiliki kekurangan dalam menampilkan struktur istilah dan hubungan antar istilah. Proses pengelompokan istilah yang dilakukan murni sintaksis<sup>15</sup> karena didasari pada pencocokan istilah secara alfanumerik. Hasilnya adalah sekelompok istilah yang memiliki kecocokan kata tanpa memiliki hubungan semantik. Selain itu, hasil dari penelusuran teks bebas hanya akan menghasilkan dua entitas, yaitu yang sesuai dengan permintaan (*query*) dan yang tidak sesuai dengan permintaan. Bagaimanapun, sistem penelusuran teks bebas tidak mampu menunjukkan hubungan semantik, sehingga sistem ini mengurangi ketepatan penelusuran.

Lain halnya dengan penelusuran teks bebas, sistem Klasifikasi, Pengindeksan Prakoordinasi, dan Pascakoordinasi merupakan sistem pengindeksan tiap-tiap istilahnya saling berhubungan dan mampu menampilkan isi intelektual dari suatu istilah. Deskriptor biasanya diambil dari suatu sistem kosakata terkendali atau bahasa indeks yang membantu meningkatkan penggunaan kosakata dalam proses penterjemahan dan temu kembali dengan memberikan acuan, dan memperlihatkan hubungan antar deskriptor. Bahasa indeks yang digunakan dalam penelusuran teks bebas, sistem Klasifikasi, Pengindeksan Prakoordinasi, dan Pascakoordinasi juga dapat menjadi sarana komunikasi antara sistem dan si penelusur dengan memberikan sekumpulan istilah terawasi yang saling berhubungan sehingga dapat digunakan untuk memperluas atau mempersempit proses penelusuran.

---

<sup>15</sup> Istilah dikelompokkan berdasarkan kecocokan kata tanpa memperlihatkan hubungan semantik

Klasifikasi merupakan sistem organisasi informasi terstruktur yang membagi istilah-istilah dalam kelas-kelas tertentu yang dalam susunannya memperlihatkan hubungan hirarkis (genus-species), klasifikasi merupakan sistem yang paling kaku karena klasifikasi cenderung memiliki struktur yang eksklusif dan memiliki hubungan absolut antara istilah dan notasi klasifikasi yang mewakilinya. Setiap istilah hanya dapat diwakili oleh satu notasi dalam suatu sistem klasifikasi.

Dalam penggunaannya, klasifikasi memberikan batasan komunikasi antara si penelusur dan sistem informasi. Dalam sistem informasi dimana struktur klasifikasi telah ditentukan, hasil penelusuran terhadap setiap permintaan dibatasi pada cakupan dari suatu kelas. Sehingga struktur klasifikasi sebetulnya merepresentasikan sekumpulan jawaban hasil penelusuran sebelum proses penelusuran tersebut dilakukan. Dengan klasifikasi, proses komunikasi menjadi satu arah (dari sistem ke penelusur) karena si penelusur harus menggunakan pemahaman dan intuisinya sendiri tentang hubungan struktural antar kelas dalam suatu bagan klasifikasi untuk dapat berinteraksi dengan sistem secara efektif.

Suatu sistem informasi dapat diidentifikasi sebagai sistem prakoordinasi ketika proses pengkategorian atau pengklasifikasian yang digunakan dalam sistem tersebut dibuat oleh pengindeks pada tahap pengindeksan. Notasi klasifikasi tentu saja dapat dikategorikan sebagai sistem prakoordinasi karena dibuat oleh si pengindeks pada tahap pengindeksan dengan menggunakan kosakata yang dibagi menurut faset-faset dan urutan sitasi yang standar. Tajuk subjek juga merupakan sistem pralaras tapi lebih elastis didalam proses penelusuran karena memungkinkan

penelusur untuk menggunakan berbagai titik akses untuk masing-masing entitas. Sekalipun memungkinkan untuk menggunakan banyak deskriptor dalam proses penelusuran untuk menjangkau hasil penelusuran yang lebih besar, permintaan yang dapat diajukan ke dalam sistem sebetulnya juga terbatas sama halnya dengan notasi klasifikasi.

Sistem pascakoordinasi yang diterapkan dalam tesaurus memungkinkan penelusur untuk menggunakan istilahnya sendiri yang dapat direpresentasikan oleh sistem sebagai permintaan penelusuran (*query*) pada saat proses temu kembali. Deskriptor dalam sistem pascakoordinasi merepresentasikan isi intelektual dari sumber aslinya karena telah dirancang oleh pengindeks pada tahap pengindeksan.

Selama proses temu kembali, penelusur dapat membangun kategori penelusurannya sendiri dengan menggabungkan beberapa deskriptor menggunakan operator seperti *Boolean logic*. Dengan demikian, sistem pascakoordinasi mendukung bentuk komunikasi yang lebih interaktif antara penelusur dan sistem.

### **II.3 Sistem Prakoordinasi dan Pascakoordinasi**

Sulistyo-Basuki menyatakan pengindeksan subyek menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan prakoordinasi dan pascakoordinasi. Dengan kata lain ada indeks prakoordinasi dan pula indeks pascakoordinasi.<sup>16</sup>

Disebut prakoordinasi sebab koordinasi atau penggabungan istilah indeks untuk deskripsi indeks dilakukan pada tahap masukan atau *input*, jadi sebelum

---

<sup>16</sup> Sulistyo-basuki, Pengantar Dokumentasi, Bandung: Rekayasa Sains. 2004.

penelusuran dilakukan. Pendekatan ini terutama digunakan untuk indeks tercetak seperti dalam majalah indeks dan abstrak, bibliografi nasional, indeks majalah, dan juga katalog subyek di perpustakaan.<sup>17</sup>

Pengindeksan prakoordinasi menghasilkan jenis indeks yang menggabungkan beberapa konsep tunggal dalam satu tajuk. Indeks prakoordinasi tidak memerlukan sarana penelusuran canggih. Penelusur cukup menelusur melalui istilah yang dia inginkan untuk mencari subjek, kemudian (dengan indeks yang disusun secara baik) penelusur dapat menemukan istilah yang diinginkan dan tinggal mengikuti instruksi dari titik akses entri pertama sampai dia dapat menemukan dokumen yang diinginkannya.<sup>18</sup>

Ciri dari pengindeksan ini adalah:

1. Subyek majemuk diperlakukan sebagai satu kesatuan
2. Pembentukan subyek majemuk dikerjakan pada tahap pengindeksan (*masuk*)
3. Perlu urutan sitiran (*citation order*) agar pengindeksan taat azas



**Gambar 4.** Diagram pra koordinasi oleh Lancaster

<sup>17</sup> Aditirto, Tesaurus : Pedoman Singkat 2005

<sup>18</sup> Jennifer Rowley, Abstracting and indexing 2<sup>nd</sup> ed. 1988. hal.132.



Lancaster menyebutkan bahwa pada sistem prakoordinasi, konsep-konsep dokumen disusun menurut urutan sitasi, pendekatan yang mungkin dilakukan bersifat linear, konsep primer menjadi titik temu sementara konsep lain tersembunyi. (hanya dapat didekati dari salah satu unsurnya). Meskipun demikian sistem seperti ini tetap diperlukan, juga dalam abad komputer, sebab:

- 1) pertimbangan ekonomis: sangat berguna apabila dalam indeks, bibliografi atau katalog untuk pendekatan subyek tiap dokumen akan diwakili oleh satu entri subyek saja;
- 2) pertimbangan praktis: dokumen hanya bisa ditempatkan di satu tempat, meskipun isinya multi-dimensional.

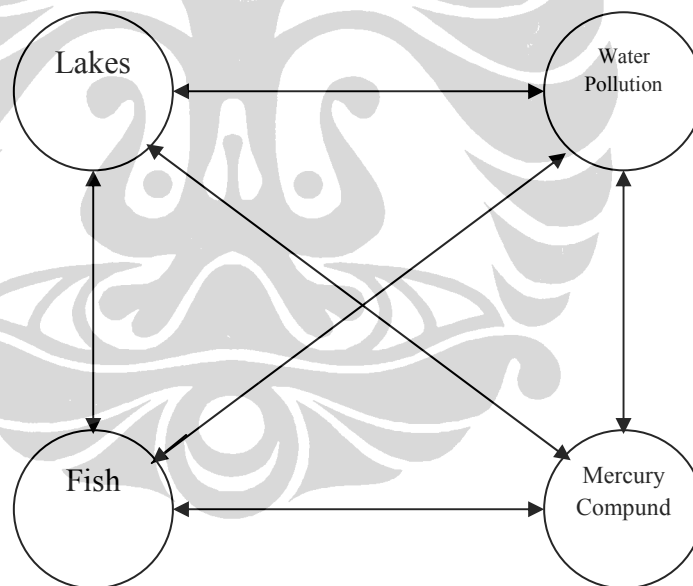
Disebut pascakoordinasi atau pasca-laras sebab koordinasi atau penggabungan istilah indeks dilakukan pada tahap penelusuran, jadi sesudah tahap masukan. Agar dapat berjalan efektif dan efisien, untuk sistem pasca-laras diperlukan komputer.

Sistem pengindeksan pasca kordinasi ditemukan oleh Mortimer Taube di awal tahun 1950an, sekalipun konsep dan aplikasi dari pengindeksan pasca koordinasi telah digunakan sejak tahun 1950an dan mengalami banyak perkembangan, esensi dari sistem pengindeksan pasca koordinasi tetap sama.

Ide awal dari Mortimer Taube ini adalah penggunaan “*uniterm*” atau konsep tunggal. Tiap dokumen yang diindeks pertama kali ditandai dengan nomer akses atau nomer serial. Kemudian dokumen tersebut dianalisa dan subjek dokumen

direpresentasikan dalam sejumlah angka. (bisa 10 atau 20) per satu konsep istilah. Kemudian penelusur membandingkan entri dalam beberapa istilah indeks agar dapat menemukan nomer dokumen untuk mencakup bidang subjek spesifik yang direpresentasikan dengan kombinasi dari beberapa istilah indeks.

Esensi dari pengindeksan pasca koordinasi ini adalah konsep-konsep dikoordinasikan pada tahap penelusuran. Pengindeksan pasca koordinasi ini sangat bergantung pada peralatan khusus dan sarana penyimpanan. Indeks Taube menggunakan kartu *uniterm*, namun, prinsip pengindeksan ini telah beradaptasi dan digunakan secara luas dalam sistem temu kembali informasi berbasis komputer.<sup>19</sup>



**Gambar 5 .** Diagram pasca koordinasi oleh Lancaster

Lancaster menyebutkan Pada sistem pascalaras tiap konsep penting dari suatu dokumen dijadikan istilah indeks (*indexing term*) yang menjadi titik temu (*access point*). Pada tahap masukan dokumen diindeks dengan menggunakan konsep-konsep

<sup>19</sup> Jennifer Rowley, hal.125.

tunggal. Pada tahap luaran atau penelusuran harus ada mekanisme atau sarana yang memungkinkan penelusur mendapatkan (*retrieve*) dokumen berdasarkan satu konsep saja (satu istilah indeks), atau berdasarkan kombinasi konsep (dari beberapa istilah indeks).

Yang termasuk indeks pascakoordinasi adalah *Uniterm cards* (Mortimer Taube), *Peek-a-boo* (H.W. Batten), *Edge notched cards*, *Computer input-output* dan tesaurus.

#### II.4 Definisi Tesaurus

Tesaurus sebagai suatu sarana temu kembali, atau yang disebut juga sebagai tesaurus yang terstruktur,<sup>20</sup> menampilkan hubungan semantik antar istilah. Sarana ini dikonstruksi untuk membantu proses pengindeksan dan temu kembali.

Terdapat beberapa definisi mengenai tesaurus yang membedakannya dari sarana pengendalian istilah lainnya, yaitu:

- (1) tesaurus diciptakan menurut seperangkat standar. ANSI/NISO Z39.19-1993, *Guidelines for the Construction, Format, and Management of Monolingual Thesauri* (1994), merupakan suatu standar yang paling umum digunakan;
- (2) tesaurus biasanya disusun dengan tujuan untuk memperlihatkan hubungan equivalensi, hirarkis dan asosiatif antar istilah kata;<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Greenberg, 1998, 2001a

<sup>21</sup> Aitchison et al., 1997, p. 47-66; ANSI/NISO Z39.19 1994, p. 15-21; Lancaster, 1986, p. 35-49.

- (3) tesaurus dibuat melalui proses intelektual manusia. Meskipun pembuatan tesaurus bisa menggunakan sarana pengolahan kata elektronik, namun peranan intelektual manusia tetap dibutuhkan untuk menerjemahkan dan membuat hubungan semantik antar istilah (contoh: hubungan equivalensi, hirarkis, dan asosiatif);
- (4) tesaurus biasanya memiliki cakupan yang spesifik. Sebagai contoh, *Thesaurus of ERIC Descriptors* (2001) mencakup istilah-istilah bidang pendidikan. Dan *ASIS Thesaurus of Information Science and Librarianship* (Milstead, 1998) mencakup istilah-istilah dalam bidang ilmu perpustakaan dan informasi;
- (5) proses konstruksi tesaurus dipandu oleh prinsip *literary warrant* yang berarti istilah-istilah yang digunakan dalam tesaurus berkaitan dengan istilah-istilah yang digunakan dalam literatur-literatur yang diterbitkan dalam disiplin ilmu yang dipilih.<sup>22</sup> Konstruksi tesaurus juga dipandu oleh prinsip *end-user warrant* yang berarti bahwa penetapan deskriptor didasarkan pada istilah yang paling umum digunakan dalam suatu komunitas dimana tesaurus tersebut dirancang;<sup>23</sup>
- (6) tesaurus memiliki perbedaan dari tesaurus yang dibuat dengan menggunakan algoritma atau tesaurus sejenis lainnya, yang dibuat berdasarkan metode statistik berdasarkan frekuensi kemunculan kembali

---

<sup>22</sup> *Ibid*, Aitchison et al., 1997, p. 47-66, p. 123; ANSI/NISO Z39.19, 1994; dan Lancaster, 1986, p. 24-26.

<sup>23</sup> *Ibid*, Lancaster, 26-27

suatu istilah dalam literatur atau teknik pembobotan. (*weighting techniques*). (e.g., Chen et al., 1995). Tesaurus juga memiliki perbedaan dengan tesaurus umum seperti *Roget's Thesaurus of English Words and Phrases* (1990), yang mengelola istilah secara gramatikal. (contoh: *nouns*, *adjectives*, *adverbs*, dan *verba*);

(7) terakhir, tesaurus berbeda dari daftar tajuk subjek, karena tesaurus didisain untuk mendukung proses penelusuran pasca koordinasi. Sedangkan daftar tajuk subjek mengandung pendekatan istilah secara linear karena daftar tajuk subjek didisain untuk mendukung penelusuran pra koordinasi;<sup>24</sup>

## II.5 Sejarah Tesaurus

Istilah tesaurus secara etimologis berasal dari bahasa latin *thesaurós* yang artinya harta atau tempat penyimpanan perbendaharaan kata. Leksikografi merupakan bidang ilmu pertama yang menggunakan istilah tesaurus dan dengan pengertian yang serupa dengan definisi awal tesaurus.<sup>25</sup>

*The Shorter Oxford English dictionary* mencatat bahwa tahun 1736 adalah tahun awal penggunaan kata tesaurus dengan arti khazanah atau gudang pengetahuan seperti kamus, ensiklopedi, dan sebagainya. *The American Dictionary Webster's*

<sup>24</sup> Dykstra, M. "LC Subject Headings Disguised as a Thesaurus." *Library Journal* 113, no. 4 (1988): 42-46

<sup>25</sup> Silvia Arano. (2005). *Thesauruses and ontologies*. Diambil dari sumber elektronik <http://www.hipertext.net> tanggal 13 Maret 2008.

mendefinisikan istilah tesaurus lebih maju, yaitu buku berisi kata atau informasi mengenai bidang tertentu atau sekumpulan konsep, khususnya kamus sinonim.<sup>26</sup>

Tesaurus, bagi masyarakat awam, adalah sebuah buku tebal yang disusun oleh Peter Mark Roget dan digunakan oleh mahasiswa untuk memperluas kosa kata mereka ketika menulis makalah serta untuk melakukan variasi representasi dari konsep yang sama.<sup>27</sup> hal senada juga dikatakan oleh ODLIS bahwa tesaurus bahasa Inggris pertama adalah tesaurus yang dibuat oleh Peter Mark Roget pada tahun 1852.<sup>28</sup> Milsteac dalam tulisannya yang berjudul *About Thesauri*, mengatakan bahwa tesaurus, bagi seorang penulis, merupakan buku seperti Roget's Thesaurus yang berisi pengelompokkan dan pengklasifikasian kata dengan tujuan untuk membantu pemilihan kata yang paling sesuai dalam menyatakan suatu maksud.

*Thesaurus of English Words and Phrases* susunan P M. Roget yang diterbitkan pada tahun 1852 memiliki anak judul yang artinya diklasifikasi dan disusun sedemikian rupa untuk memfasilitasi pengekspresian gagasan dan untuk membantu dalam susunan sastra.<sup>29</sup> Sejumlah kata dan frase yang terdapat dalam tesaurus ini tidak disusun menurut abjad seperti lazimnya suatu kamus, melainkan disusun dengan dikelompokkan berdasarkan hubungan konseptual antar kata dan frase tersebut. Foskett mengatakan bahwa tesaurus ini sangat dikenal oleh siapa saja yang memperhatikan kualitas dalam menulis karena pada dasarnya tesaurus ini

---

<sup>26</sup> Gilchrist Alan. (1971). *The thesaurus in retrieval*. London: Aslib hal. 4

<sup>27</sup> Batty, 1998.

<sup>28</sup> ODLIS, 2004,

<sup>29</sup> *Op.cit* Foskett, 1985, 270.

merupakan suatu skema klasifikasi untuk sejumlah istilah dengan dilengkapi indeks berabjad.<sup>30</sup>

Tesaurus dalam dunia perpustakaan dikenal pada akhir tahun 1950-an. kemunculannya seiring dengan kemunculan sistem pengindeksan pascalaras yang membutuhkan istilah yang sederhana dengan tingkat pralaras yang rendah. tesaurus memulai peranannya dalam dunia perpustakaan pada awal tahun 1950-an dan telah digunakan untuk mengindeks secara luas.

Hans Peter Luhn pada tahun 1957 dalam makalahnya yang berjudul *A Statistical Approach to Mechanised Literature Searching* menyarankan perlunya ada semacam tesaurus seperti yang dibuat oleh Roget untuk sistem simpan dan temu kembali informasi. Luhn memajukan gagasan ini dalam kerjanya di Pusat Penelitian Perusahaan I.B.M. Ia mencari cara yang sederhana untuk membuat dengan bantuan komputer suatu daftar kata yang dapat digunakan dalam proses pengirideksan subyek lengkap dengan sistem acuan silang. Menurut Lancaster, tesaurus untuk pengawasan kosa kata dalam sistem temu kembali informasi yang pertama adalah tesaurus yang disusun oleh Pusat Informasi Teknik *E.I. Dupont de Nemours* pada tahun 1959.<sup>31</sup>

ALA mendefinisikan tesaurus sebagai kompilasi istilah-istilah yang menunjukkan hubungan sinonim, hirarkis dan hubungan lainnya. Fungsi dari tesurus ini adalah untuk menjadi standar, kosakata terkendali untuk sistem simpan dan temu

---

<sup>30</sup> *Ibid.* 271.

<sup>31</sup> *Op.cit.*, Lancaster 21.

balik informasi.<sup>32</sup> Sedangkan apabila didefinisikan berdasarkan fungsi merupakan sarana pengendalian kosa kata yang digunakan untuk menterjemahkan dari bahasa alami dokumen ke sistem bahasa terkendali. Apabila didefinisikan dari strukturnya, tesaurus merupakan kosakata terkendali dan dinamis yang memiliki hubungan semantik dan generik yang mencakup disiplin ilmu yang spesifik.<sup>33</sup>

## II.6 Tujuan Tesaurus

Aitchison, Gilchrist dan Bawden berpendapat bahwa tujuan utama tesaurus adalah untuk temu kembali informasi. Tujuan sekundernya meliputi membantu pemahaman secara umum bidang subyek, menyediakan peta semantik dengan menunjukkan hubungan resiprokal dari istilah, dan membantu menyediakan definisi istilah.<sup>34</sup> NISO yang diakreditasi oleh *American National Standards Institute* (ANSI) untuk membuat standar dalam bidang ilmu informasi dan perpustakaan, menyebutkan ada 4 (empat) tujuan dasar, yaitu:

- (1) translasi, yaitu untuk menyediakan jalan tengah untuk menerjeraahkan bahasa alamiah dari pengarang, pengindeks dan pemakai ke dalam kosa kata indeks yang digunakan dalam pengindeksan dan temu kembali;
- (2) konsistensi, yaitu untuk menjaga konsistensi dalam penetapan descriptor;
- (3) indikasi hubungan, yaitu untuk mengindikasikan hubungan semantik antar istilah;

<sup>32</sup> The ALA glossary of library and information science, 1983

<sup>33</sup> Harrod's librarians' glossary and reference book. 7th ed. 1990.

<sup>34</sup> *Op.cit*, Aitchison, 1997, i



- (4) Temu kembali, yaitu sebagai alat bantu penelusuran dalam temu kembali.<sup>35</sup>

Adapun Chowdury membagi tujuan tesaurus menjadi 4 (empat), yaitu:

- (1) mengawasi istilah yang digunakan dalam pengindeksan dengan menyediakan cara penerjemahan bahasa alamiah pengarang, pengindeks, dan pemakai ke dalam bahasa yang digunakan untuk pengindeksan dan temu kembali;
- (2) memastikan kekonsistenan antara pengindeks yang berbeda;
- (3) membatasi jumlah istilah yang diberikan pada dokumen sebagai representasi subyek dokumen;
- (4) sebagai alat bantu dalam temu kembali, termasuk temu kembali dalam sistem *free-text*.<sup>36</sup>

Sedangkan *Encyclopedia of library and information science* merumuskan tujuan tesaurus kedalam lima bagian yaitu:

- (1) untuk menyediakan peta ruang lingkup disiplin ilmu tertentu, mengindikasikan bagaimana konsep-konsep atau ide tentang konsep dapat berhubungan satu sama lain, yang dapat membantu pengindeks atau penelusur untuk mengerti struktur dari bidang ilmu tersebut;
- (2) untuk menyediakan kosakata standar untuk subjek ilmu yang dicakup. Fungsinya untuk meyakinkan bahwa si pengindeks membuat entri indeks yang konsisten dalam suatu sistem simpan dan temu kembali informasi;

---

<sup>35</sup> National, 1994, 1

<sup>36</sup> Op.cit, Chowdury 1999, 125

- (3) untuk menyediakan sistem referensi antar istilah yang memastikan bahwa hanya satu istilah dari seperangkat sinonimnya yang digunakan untuk mengindeks konsep tunggal;
- (4) untuk menyediakan panduan bagi pengguna sistem, sehingga mereka dapat memilih istilah yang tepat dalam melakukan pencarian subjek;
- (5) tujuan yang didambakan adalah sebagai sarana standarisasi istilah yang digunakan dalam disiplin ilmu tertentu;<sup>37</sup>

## II.7 Sarana Pengendalian Kata Dalam Tesaurus

Lancaster menyebutkan bahwa tesaurus adalah sarana pengendali kosa kata. Dalam ANSI/NISO Z39.19-1993 disebutkan bahwa pengendalian kosa kata dalam tesaurus dapat dicapai melalui tiga cara, yaitu menunjukkan ruang lingkup dari deskriptor; menghubungkan istilah sinonim melalui hubungan ekuivalensi; dan menghilangkan ambiguitas dari homograf. Adapun *British Standard Guide to Establishment and Monolingual Thesauri* menyebutkan bahwa terdapat dua cara untuk mengendalikan kosa kata dalam tesaurus, yaitu istilah dibatasi dengan sengaja dalam cakupan arti yang diinginkan; dan ketika konsep yang sama dapat diekspresikan oleh dua atau lebih sinonim, maka salah satu dari istilah tersebut dipilih sebagai deskriptor lalu acuan kepada deskriptor harus dibuat dari setiap sinonim yang mungkin sebagai titik temu pemakai.

---

<sup>37</sup> (Encyclopedia of library and information science, 1980.)

*Thesaurus construction and use: a practical manual* menyebutkan bahwa pengendalian kosa kata dalam tesaurus dapat dicapai melalui beberapa cara,<sup>38</sup> yaitu :

- (1) mengendalikan bentuk istilah, meliputi bentuk tata bahasa, pengucapan, bentuk tunggal dan jamak, singkatan, dan bentuk majemuk dari istilah;
- (2) memilih satu istilah antara dua atau lebih istilah sinonim yang ada untuk mengekspresikan konsep yang sama;
- (3) memutuskan apakah menerima istilah dari beberapa tipe istilah seperti kata pinjaman, kata populer, kata perdagangan, dan nama diri; serta bagaimana memperlakukannya, dan;
- (4) membatasi arti dari istilah dengan memberikan ruang lingkup serta memberikan *qualifier* untuk istilah homograf .

Pengendalian istilah sangat diperlukan dalam pengindeksan dikarenakan variasi bahasa alami. Pengendalian istilah ini akan mengatur agar hanya istilah tertentu saja yang akan digunakan sebagai tajuk subjek atau titik akses. Istilah ini disebut sebagai istilah terpilih

## II.8 Komponen Tesaurus

Komponen utama dari suatu tesaurus ialah suatu daftar yang lazimnya disusun menurut abjad, yang terdiri dari dua komponen, yaitu:

- (1) istilah indeks atau deskriptor, yaitu istilah-istilah yang dapat digunakan untuk menyatakan suatu konsep dalam sistem simpan dan temu kembali;

---

<sup>38</sup> Aitchison, 1997, 15

- (2) istilah non deskriptor yang berfungsi sebagai istilah entri, berfungsi sebagai pemandu ke deskriptor.

Deskriptor sedapat mungkin harus menyatakan konsep tunggal. Suatu konsep dapat diwakili oleh deskriptor yang terdiri atas satu kata atau lebih dari satu kata. Meskipun demikian ada pula deskriptor yang mengandung gabungan konsep. Pertimbangan dan kriteria khusus yang diterapkan untuk mengizinkan deskriptor berupa istilah majemuk. Pertimbangan itu adalah bila konsep tersebut istilah majemuk digunakan dengan cukup sering, sehingga oleh pemakai istilah tersebut sudah dianggap sebagai satu pengertian. Dengan demikian, istilah majemuk ini tetap dipertahankan (tidak dipecah ke dalam komponen-komponen tunggal).

## II.9 Jenis Hubungan

Dalam Tesaurus ada tiga jenis hubungan yang perlu diperlihatkan, yaitu :

- (1) hubungan kesetaraan/sinonim
- (2) hubungan hirarkis
- (3) hubungan asosiatif

Hubungan	Indikator hubungan	Singkatan
Kesetaraan (Sinonim)	<b>G</b> atau <b>Gunakan</b> , sebagai pengganti <b>USE</b>	G

	<b>GU</b> atau <b>Gunakan Untuk</b> , sebagai pengganti <b>UF</b> ( <i>Use For</i> )	GU
Hirarkis	<b>IL</b> atau <b>Istilah Luas</b> , sebagai pengganti <b>BT</b> ( <i>Broader Term</i> )	IL
	<b>IK</b> atau <b>Istilah Khusus</b> , sebagai pengganti <b>NT</b> ( <i>Narrower Term</i> )	IK
Asosiatif	<b>IB</b> atau <b>Istilah Berhubungan</b> , sebagai pengganti <b>RT</b> ( <i>Related Term</i> )	IB

**Tabel 1.** Jenis-jenis peragaan hubungan dalam tesaurus

### II.9.1 Hubungan Kesetaraan/Sinonim

Tujuan utama dari tesaurus adalah untuk menghubungkan (*Match*) istilah-istilah yang digunakan oleh si penelusur dan pengindeks. Apabila suatu istilah memiliki banyak alternatif nama lain (sinonim), maka kita harus memilih satu istilah yang akan digunakan sebagai deskriptor/istilah entri, dan memberikan acuan ke masing-masing istilah yang tidak digunakan, sehingga dapat terjadi *match* antara istilah yang digunakan oleh penelusur dengan deskriptor.

<i>Tenis Meja</i>	GUNAKAN UNTUK	Ping-Pong
<i>Ping-Pong</i>	GUNAKAN	<i>Tenis Meja</i>

### II.9.2 Hubungan hirarkis

Hubungan hirarkis merupakan fitur utama yang membedakan tesaurus dari sarana kumpulan istilah lainnya, seperti kamus. Hubungan hirarkis ini didasari pada derajat atau level dari istilah itu sendiri, apakah istilah tersebut subordinat atau superordinat.

Istilah superordinat merepresentasikan klas, atau keseluruhan, sedangkan deskriptor subordinat merepresentasikan anggota/bagian dari klas. Dalam tesaurus, hubungan hirarkis ini direpresentasikan dengan notasi sebagai berikut:

- (1) BT (*Broader Term*) = IL (Istilah luas) = merupakan label untuk deskriptor superordinat
- (2) NT (*Narrower Term*) = IK (Istilah Khusus) = Merupakan label untuk deskriptor subordinat.

Hubungan hirarkis mencakup Hubungan Generik, hubungan kategori dengan contoh spesifik dan hubungan keseluruhan dan sebagiannya. Setiap deskriptor subordinat harus merepresentasikan konsep yang sama dengan deskriptor superordinatnya, dengan kata lain, Istilah Luas dan Istilah Khusus dapat merepresentasikan sesuatu, benda, tindakan, dan lain sebagainya.

### II.9.3 Istilah Berhubungan

Jika kita telah membuat hubungan hirarkis, *genus-species*, maka kita perlu juga untuk membuat mekanisme lain untuk memberikan acuan ke deskriptor lainnya yang pengindeks dan penelusur harus pertimbangkan ketika melakukan penelusuran.

Istilah hubungan bisa mencakup:

- (1) objek dan disiplin ilmu dimana istilah tersebut berasal;
- (2) proses dan Produk;
- (3) alat dan proses.

Dimungkinkan juga untuk menggunakan Istilah Berhubungan untuk menghubungkan antara istilah yang mungkin secara hirarkis tidak berhubungan, namun memiliki kemungkinan akan ditelusuri oleh si penelusur apabila dia sedang mencari di bawah deskriptor tertentu.

### II.10 Peragaan Tesaurus

terdapat tiga macam format tesaurus tercetak yaitu

- (1) berabjad:— menunjukkan tiap hubungan terdekat dari tiap istilah
- (2) hirarkis: — memperlihatkan semua tingkatan hirarki
- (3) digilir (*permuted* atau *rotated*): — berfungsi sebagai indeks dimana tiap kata dalam deskriptor atau istilah entri secara bergilir menjadi titik temu.

Ketiga tipe dasar ini memiliki berbagai versi atau variasi, seperti terlihat pada contoh-contoh terlampir. Dalam satu tesaurus kadang-kadang ketiga format digunakan, sebab dengan demikian tercapai kemudahan terbesar bagi pemakai. Semua tesaurus menampilkan peragaan berabjad, yang dilengkapi dengan peragaan lain yang oleh penyusun tesaurus dianggap perlu.

Prinsip yang diutamakan dalam mendesain format tesaurus tercetak ialah bahwa pemakai tidak boleh dibuat repot, maka diupayakan agar pemakai cukup melihat satu susunan atau peragaan saja. Karena itu misalnya rujukan USE dari istilah tidak terpilih (yang menjadi *entry term*) ke istilah terpilih atau deskriptor diintegrasikan ke dalam susunan berabjad deskriptor suatu tesaurus.

### **II.11 Peraturan Standar Untuk Konstruksi Tesaurus**

Dalam melakukan konstruksi tesaurus pengindeks sebaiknya berpedoman pada suatu standar tertentu. Standar dibuat sebagai panduan untuk mengembangkan tesaurus (baik dalam tesaurus satu bahasa maupun multilingual), Mengikuti seperangkat peraturan dalam suatu standar tesaurus akan mempermudah pengindeks dalam membuat tesaurus.

Standar dalam membuat tesaurus dapat memberikan panduan seperti bagaimana tesaurus harus dikonstruksi, jenis-jenis hubungan apa yang harus dimasukkan, bagaimana cara mengidentifikasi istilah terpilih dan lain sebagainya, selain itu, standar juga akan mempermudah pengideks untuk mengembangkan tesaurus di kemudian hari



Terdapat beberapa standar internasional yang umum digunakan dalam melakukan konstruksi tesaurus, diantaranya :

- 1) *Documentation--guidelines for the establishment and development of monolingual thesauri*. 2. ed.  
Geneva: International Organization for Standardization; 1986.  
Standar Internasional ISO 2788-1986(E).  
Standar ini dibuat berdasarkan pertemuan Austin, September 1981.
- 2) *Guidelines for construction, format, and management of monolingual thesauri: An American National Standard* dikembangkan oleh the National Information Standards Organization.  
Bethesda, MD: NISO press; 1994. 69p.  
ANSI/NISO Z39.19-1993 R1998
- 3) *British standard guide to the establishment and development of monolingual thesauri*.  
London: British Standards Institution; 1987
- 4) *Documentation--guidelines for the establishment and development of multilingual thesauri*.  
Geneva: International Organization for Standardization; 1985.  
Standar Internasional ISO 5964-1985(E).  
Standar ini berdasarkan panduan Unesco<sup>39</sup>
- 5) *Guidelines for Multilingual Thesauri*  
Working Group on Guidelines for Multilingual Thesauri, Classification and Indexing Section,  
IFLA, April 2005.<sup>40</sup>

Peraturan standar yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Guidelines for construction, format, and management of monolingual thesauri* yang dikeluarkan oleh NISO. Panduan ini dipilih karena menjabarkan urutan pembuatan tesaurus secara detail, disertai dengan banyak bagan untuk mempermudah pemahaman, dan dilengkapi juga dengan contoh jenis-jenis peragaan tesaurus yang ada.

<sup>39</sup> Soergel, Dagobert. (2006). *Construction and Maintenance of Index Languages and Thesauri*. University of Maryland College of Library and Information Services.

<sup>40</sup> IFLA. (2005), *Guidelines for Multilingual Thesauri*. Working group on guidelines for multilingual thesauri classification and indexing section.

Panduan yang dikeluarkan oleh NISO ini diperbaharui secara rutin diantaranya tahun 1980, 1994, 1998, dan revisi terakhir (yang digunakan dalam penelitian ini) tahun 2003.

## II.12 Pendekatan Konstruksi Tesaurus

Terdapat tiga pendekatan utama dalam merancang tesaurus, yaitu:

- 1) Membuat tesaurus baru dengan pendekatan *bottom up*
  - a) mengembangkan kelompok yang terdiri dari para ahli subjek yang nantinya berfungsi sebagai penasihat; Lakukan koordinasi dengan kelompok ahli subjek ini untuk menentukan cakupan dari tesaurus jika belum ditentukan;
  - b) jika telah terdapat kumpulan dokumen sarana pengindeksan yang dianggap representatif, istilah-istilah indeks tersebut bisa digunakan sebagai daftar istilah awal;
  - c) jika belum ada, lakukan pengindeksan terhadap dokumen-dokumen yang dianggap representatif dengan menggunakan bahasa alami (apabila tidak terdapat sarana pengendalian kata), dan ambil istilah-istilah ini sebagai daftar istilah awal;
  - d) lakukan konstruksi tesaurus dengan melakukan pengecekan kembali dan pengorganisasian istilah-istilah yang sudah diperoleh dari langkah-langkah sebelumnya dengan menggunakan berbagai sarana bantu;

- e) lakukan konsultasi dengan ahli subjek untuk istilah-istilah yang arti atau penggunaannya tidak jelas, dan juga memberikan masukan variasi istilah atau sinonim yang mengacu kepada istilah tersebut (atau penjelasan apakah kedua istilah tersebut benar-benar sinonim dalam bidang subjek yang dicakup);
  - f) hasil akhirnya adalah berupa draf tesaurus, lakukan pengetesan terhadap indeks-indeksnya, dan lakukan revisi;
- 2) Kombinasi dari tesaurus yang telah ada
- a) menggabungkan dua atau lebih tesaurus yang telah ada kedalam satu tesaurus yang baru untuk kemudian digunakan dalam proses pengindeksan dan temu kembali;
  - b) menghubungkan antara tesaurus dan daftar tajuk subjek yang sudah ada sebelumnya;
- 3) Menerjemahkan tesaurus dari bahasa asli ke bahasa yang diinginkan

Penelitian ini bertujuan untuk membuat tesaurus baru, karena tesaurus dengan subjek korupsi belum pernah ada sebelumnya. pendekatan yang digunakan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *bottom up*

### **II.13 Langkah-Langkah Konstruksi Tesaurus**

Langkah-langkah dalam menyusun tesaurus tergantung pada standar konstruksi yang digunakan, dalam penelitian ini digunakan standar dari NISO. Langkah konstruksi tesaurus NISO ini meliputi:

#### 1) Menghindari Duplikasi

Sebelum memutuskan untuk membuat tesaurus baru sebaiknya dilakukan penyelidikan untuk mengetahui ada atau tidaknya tesaurus yang sama. agar pembuatan tesaurus tidak menjadi sia-sia. Namun jika tidak ada tesaurus yang sama, maka perlu diselidiki kembali apakah ada tesaurus sejenis atau yang mendekati dengan tesaurus yang akan dibuat. Jika ada maka, tesaurus tersebut dapat dijadikan dasar dalam pembuatan tesaurus yang baru. Dengan adanya dasar tersebut pembuatan tesaurus akan lebih mudah;

#### 2) Menentukan Struktur dan format Peragaan

Struktur dan format peragaan tesaurus perlu ditentukan terlebih dahulu karena akan mempengaruhi tipe dan indikator hubungan yang diperagakan dalam tesaurus tersebut. Tesaurus yang akan dibuat dalam penelitian ini menggunakan peragaan *Flat Thesaurus*;

#### 3) Metode

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pengumpulan istilah akan dilakukan dengan metode *literary warrant*. Sumber istilah yang digunakan yaitu buku yang berkaitan dengan bidang korupsi;

#### 4) Bantuan Mesin

ANSI/NISO Z39.19 – 2003 menganjurkan untuk menggunakan katalog komputer dalam melakukan pencarian istilah. Hal ini dilakukan dengan melakukan identifikasi calon istilah secara otomatis contohnya melalui judul

maupun abstrak dan melihat frekuensi penggunaan istilah yang terekam dalam katalog;

#### 5) Rekaman Istilah

Setiap deskriptor maupun istilah entri yang dimasukkan ke dalam tesaurus harus dibuat catatannya masing-masing. Catatan yang dibuat untuk istilah entri seperti sumber istilah dan tanggal istilah ditemukan dan dimasukkan ke dalam tesaurus. Sedangkan catatan untuk deskriptor bisa mencakup keseluruhan atau sebagian dari entri dibawah ini, yaitu:

- Deskriptor;
- Sumber-sumber yang digunakan dalam menemukan deskriptor. Bagian ini penting terutama bagi istilah yang kurang dikenal. Catatan pada bagian ini dapat termasuk kutipan dari sumber yang dipublikasikan atau nama ahli yang diajak berkonsultasi;
- Ruang lingkup istilah;
- Sinonim;
- Variasi lain yang tidak ditampilkan, misalnya pengejaan yang salah;
- Istilah luas;
- Istilah khusus atau sempit;
- Istilah yang berkaitan;
- *Locally established relationships*;
- Kategori atau nomor klasifikasi;

- Tanggal, termasuk tanggal dimasukkan dan perubahan istilah;

#### 6) Verifikasi Istilah

Setiap istilah yang akan dimasukkan ke dalam tesaurus harus diverifikasi terlebih dahulu. Selain itu hubungan antar deskriptor juga harus dikaji kembali ketepatannya. Verifikasi ini dilakukan melalui kamus istilah terkait, ensiklopedia, bagan klasifikasi, dan juga dengan melakukan wawancara dengan seorang ahli

#### 7) Tingkat Kekhususan

Penambahan deskriptor yang sangat spesifik biasanya dibatasi pada wilayah inti dari bidang subjek yang dicakup oleh tesaurus. Pada penelitian ini dibatasi untuk area inti dari bidang subyek korupsi. Pada langkah ini, peneliti melihat apakah istilah yang terkumpul sudah spesifik untuk cakupan bidang korupsi. Selain itu juga, peneliti melihat apakah istilah yang terkumpul tidak melebar keluar dari cakupan bidang subyek inti.

### II.14 *Literary Warrant*

Pengumpulan istilah dapat dilakukan dengan menggunakan dua macam pendekatan, yaitu *user warrant* dan *literary warrant*.<sup>41</sup> *user warrant* adalah pengumpulan istilah yang didasarkan pada frekuensi penggunaan suatu istilah oleh pengguna. Sedangkan *literary warrant* berarti istilah yang dipilih adalah yang

---

<sup>41</sup> ANSI/NISO Z39.19 (2003)

dipakai dalam literatur. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah *literary warrant*.

Istilah *warrant* dapat diartikan sebagai “menyediakan dasar/landasan yang cukup untuk” dan “jaminan terhadap kualitas & keakuratan”.<sup>42</sup> *warrant* dalam hubungannya dengan organisasi informasi dapat dijabarkan sebagai suatu otoritas untuk menentukan dan menverifikasi keputusan tentang konsep/istilah yang dapat dimasukkan/digunakan dalam suatu sistem organisasi informasi, dan dalam susunan apa suatu konsep/istilah harus ditampilkan dalam suatu sistem informasi. *Warrant* yang didasari atas hubungan semantik akan sangat berguna bagi si pengindeks dan juga pada pengguna.<sup>43</sup>

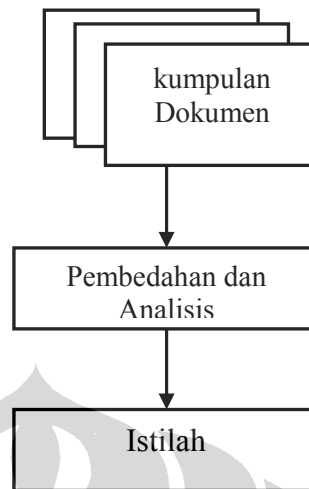
Istilah *literary warrant* dapat diartikan sebagai hasil dari suatu survei yang akurat dan pengukuran terhadap suatu konsep/istilah yang terdapat didalam literatur. Konsep/istilah hanya dapat dimasukkan kedalam suatu sistem informasi apabila literatur-literatur yang terdapat bentuk buku (dan berbagai bentuk media lainnya) telah memperlihatkan keberadaan istilah/konsep tersebut.

Proses pengumpulan istilah dengan menggunakan pendekatan *literary warrant* dalam penelitian ini dapat dilihat dalam gambar berikut:

---

<sup>42</sup> Wordnet 2.1

<sup>43</sup> Beghtol, C. (1995). *Domain analysis, literary warrant, and consensus, the case of fiction studies*. *Journal of the American Society for Information Science*, 46(1), 30-44



**Gambar 6.** Proses pengumpulan istilah dengan menggunakan pendekatan *literary warrant*

Pendekatan *literary warrant* dirasa lebih tepat berdasarkan dua alasan. Pertama, istilah-istilah yang terdapat dalam tesaurus akan mencerminkan istilah-istilah yang hidup dalam literatur sehingga konformitas antara bahasa indeks dalam tesaurus dengan bahasa pengarang dalam literatur akan tinggi. Kedua, pendekatan ini meniadakan keharusan mengingat lalu mencatat demikian banyak istilah. Pendekatan ini diharapkan akan melahirkan tesaurus yang cakupannya relatif baik dalam mengindeks literatur yang menjadi bidangnya.<sup>44</sup>

Pendekatan *literary warrant* telah diakui secara luas dalam pembentukan sarana pengorganisasian informasi. DDC (*Dewey Decimal Classification*) sejak awal pengembangannya telah menggunakan prinsip *literary warrant*. Hubungan asosiatif dalam istilah/konsep seringkali diperlakukan sebagai hubungan ekuivalensi atau

<sup>44</sup> Simanjuntak, Melling & Nurasih (1987). "Penyusunan thesaurus on women in development" *Majalah Ilmu Perpustakaan dan Informasi*. Jakarta: Keluarga Jurusan Ilmu Perpustakaan FSUI. Th. IV No.4 (Desember) 1987, p.34-37



hirarkis karena begitulah istilah/konsep tersebut diperlakukan dalam berbagai literatur yang diterbitkan.<sup>45</sup>

## II.15 Pengertian Korupsi

Korupsi memiliki arti yang sangat umum, istilah "korupsi" mempunyai banyak arti bergantung pada pendekatan yang digunakan. Pendekatan yang dapat dilakukan terhadap masalah korupsi bermacam ragam dan akhirnya pemaknaannya sesuai dengan dari sudut pandang pendekatan yang dijadikan pisau analisis. kalau ditelusuri, dari segi semantik, "korupsi" berasal dari bahasa Inggris, yaitu *corrupt*, yang berasal dari perpaduan dua kata dalam bahasa latin yaitu *com* yang berarti bersama-sama dan *rumpere* yang berarti pecah atau jebol. Istilah "korupsi" juga bisa dinyatakan sebagai suatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. Dalam prakteknya, korupsi lebih dikenal sebagai menerima uang yang ada hubungannya dengan jabatan tanpa ada catatan administrasinya.<sup>46</sup>

Menurut *Webster Student Dictionary* adalah *corruptus*. Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian dan lain-lain.<sup>47</sup>

<sup>45</sup> Mitchell, J. (2001). *Relationships in the Dewey Decimal Classification System*. IN: Bean, C. A. & Green, R. (Eds.). (2001). *Relationships in the organization of knowledge*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. (Pp. 211-226).

<sup>46</sup> Masyarakat Transparansi Indonesia, Pengertian atau Definisi Korupsi. Jakarta: MTI, 2006. diambil dari sumber elektronik <http://www.transparansi.or.id> / pada 31 Agustus 2007.

<sup>47</sup> Hiariej, 35. 2006

Dalam analisis fenomenologis, korupsi mengandung dua unsur penting yaitu penipuan dan pencurian. Apabila bentuknya pemerasan, itu berarti pencurian melalui pemaksaan korban. Apabila berbentuk penyuapan terhadap pejabat, ini berarti membantu terjadinya pencurian. Jika terjadi dalam bentuk kontak, korupsi berarti pencurian keputusan sekaligus pencurian uang hasil keputusan.<sup>48</sup>

Suapan (sogokan) itu diberi definisi sebagai "hadiah, penghargaan, pemberian, atau keistimewaan yang dianugerahkan atau dijanjikan dengan tujuan merusak pertimbangan atau tingkah laku, terutama dan seorang dalam kedudukan terpercaya".

Secara hukum pengertian "korupsi" adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Di dalam perspektif hukum yang berlaku di Indonesia, definisi "korupsi" secara gamblang telah dijelaskan dalam UU no. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Masih banyak lagi pengertian-pengertian lain tentang korupsi baik menurut pakar atau lembaga yang kompeten.

Korupsi muncul dalam berbagai bidang, mulai dari partai politik sampai lembaga Negara, dalam skala kecil atau besar, dan dapat dijalankan secara terencana maupun tidak terencana dengan baik. banyak anggapan yang menyatakan bahwa

---

<sup>48</sup> SH Alatas, 129

korupsi sering kali dilakukan untuk memfasilitasi tindakan kriminal seperti perdagangan obat-obatan terlarang, tindak pencucian uang, dan kegiatan prostitusi. Namun demikian, korupsi tidak hanya terbatas pada hal-hal tersebut. Untuk dapat lebih memahami tindakan korupsi, sangat penting bagi kita untuk dapat membedakan antara masalah kriminal dan korupsi.

Korupsi menjadi permasalahan yang sangat serius dalam perkembangan suatu negara, dalam ranah politik, korupsi bisa menodai proses demokrasi dan upaya pembentukan good governance dengan mempengaruhi proses-proses demokrasi. Korupsi dalam proses pemilihan umum dan di tubuh legislatif dapat mengurangi akuntabilitas dan representasi masyarakat dalam pembuatan keputusan politik, korupsi didalam badan-badan yudisial dapat mempengaruhi peranan hukum, dan korupsi di bidang administrasi public berdampak pada diskriminasi layanan. Secara umum, korupsi menghancurkan legitimasi pemerintah dan nilai-nilai demokrasi seperti rasa saling percaya dan toleransi.

Korupsi juga dapat mempengaruhi proses perkembangan ekonomi dengan menghasilkan gangguan dan inefisiensi. Dalam sektor-sektor privat, korupsi meningkatkan beban biaya usaha dengan tindakan memperkaya diri sendiri. Dalam sektor-sektor publik, korupsi juga menimbulkan permasalahan dengan usaha mengalihkan investasi publik dari sektor sosial dan pendidikan ke sektor proyek-proyek kapital.

Upaya pemberantasan korupsi kini kian marak di berbagai negara semenjak makin maraknya tuntutan terhadap paradigma good governance dalam seluruh kegiatan di era globalisasi dewasa ini. Lembaga-lembaga donor internasional, seperti Bank Dunia, IMF dan ADB bahkan telah secara tegas meminta ditegakkannya paradigma good governance di negara-negara yang memperoleh bantuan dari mereka, termasuk Indonesia. Dengan demikian, bagi Indonesia, terwujudnya good governance telah menjadi suatu keharusan yang harus diupayakan.

## II.16 Ruang Lingkup Korupsi

Untuk dapat lebih memahami dampak yang diakibatkan oleh korupsi, pertama-tama kita harus mengetahui hakikat sebenarnya dari korupsi. Dalam UU no. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- (1) **kerugian keuangan negara**, yaitu penyalahgunaan kewenangan untuk menguntungkan diri dan dapat dapat merugikan keuangan negara. (Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001: setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

- (2) **suap-menyuap**, yaitu upaya penyuapan kepada pegawai negeri. (Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: member atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- (3) **penggelapan dalam jabatan**, yaitu upaya pegawai negeri untuk memalsukan buku untuk pemeriksaan administratif. (Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001: pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi;
- (4) **perbuatan pemerasan**, yaitu upaya pegawai negeri untuk melakukan pemerasan. (Pasal 12 huruf e UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001: pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan

sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

(5) **perbuatan curang**, upaya perbuatan curang adalah korupsi. (Pasal 7 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang);

(6) **benturan kepentingan dalam pengadaan**, adalah pegawai negeri yang turut serta dalam pengadaan yang diurusnya. (Pasal 12 huruf I UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001: pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya);

(7) **gratifikasi**, Pegawai negeri yang menerima gratifikasi dan tidak melaporkannya kepada KPK adalah korupsi. (Pasal 12 B UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya);

Selain hal-hal yang tersebut diatas, tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi antara lain:

- (1) merintangai proses pemeriksaan perkara korupsi ( UU No. 31 Tahun 1999);
- (2) tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya (Pasal 22 UU no. 31 Tahun 1999 dan dikaitkan dengan Pasal 28 UU 31 Tahun 1999);
- (3) bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka (Pasal 22 UU no. 31 Tahun 1999 dan dikaitkan dengan Pasal 29 UU 31 Tahun 1999);
- (4) saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu (Pasal 22 UU no. 31 Tahun 1999 dan dikaitkan dengan Pasal 35 UU 31 Tahun 1999);
- (5) orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu (Pasal 22 UU no. 31 Tahun 1999 dan dikaitkan dengan Pasal 36 UU 31 Tahun 1999);
- (6) saksi yang membuka identitas pelapor (Pasal 24 UU no. 31 Tahun 1999 dan dikaitkan dengan Pasal 3 UU 31 Tahun 1999);

Seluruh pasal-pasal yang disebutkan diatas secara utuh telah menggambarkan tindakan-tindakan yang dapat dikatagorikan sebagai tindakan korupsi

Ada beberapa jenis dan modus korupsi di Indonesia antara lain:<sup>49</sup>

**(1) Pengadaan barang dan jasa**

dimana adanya *mark up* nilai proyek dan kolusi dengan kontraktor;

---

<sup>49</sup> Chaniago, Republika, 2006

**(2) Penghapusan Inventaris dan aset negara (tanah)**

bahwa adanya klaim atau mengaku sebagai milik sendiri dan menjualnya;

**(3) Pungli**

Adanya biaya siluman pada penerimaan pegawai dan semacamnya. pembayaran gaji, kenaikan pangkat dan semacamnya, pengurusan berbagai keperluan administrasi;

**(4) Pemotongan Dana Sosial berbagai keperluan;****(5) Adanya Bantuan Fiktif**

Berupa membuat surat permohonan bantuan fiktif seolah-olah ada permintaan bantuan kepada pemerintah dari pihak luar;

**(6) Penyelewengan dana proyek**

Mengambil dana proyek pemerintah di luar ketentuan resmi dan memotong dana proyek tanpa sepengetahuan pihak yang berwajib;

**(7) Proyek fiktif**

Dana dialokasikan dalam laporan resmi tetapi secara fisik tidak pernah ada;

**(8) Manipulasi hasil penerimaan penjualan, penerimaan pajak, restribusi dan iuran;****(9) Manipulasi proyek fisik**

Memungut komisi tidak resmi dari kontraktor serta memark up nilai proyek;

**(10) Daftar gaji atau honor fiktif;****(11) Manipulasi dana pemeliharaan atau renovasi;****(12) Pemotongan dana bantuan;**



**(13) Pembayaran fiktif uang lauk pauk bagi PNS atau prajurit;**

**(14) Pungli di berbagai perizinan**

Kolusi dengan pengusaha yang mengurus izin;

**(15) Pungli perizinan disektor kependudukan dan imigrasi**

Adanya Kolusi dengan pengusaha yang mengurus izin;

**(16) Manipulasi proyek pengembangan ekonomi rakyat**

Penyerahan dalam bentuk uang;

**(17) Manipulasi ganti rugi tanah dan bangunan**

Dimana pegawai yang mengurusnya tidak memberikan jumlah ganti rugi yang seharusnya.<sup>50</sup>

Sedangkan menurut Wertheim<sup>51</sup>, seorang pejabat dikatakan melakukan korupsi apabila ia menerima hadiah dari seseorang agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan pemberi hadiah. Meminta hadiah atau balas jasa karena terlaksananya suatu tugas yang sebenarnya kewajiban, bagi Wertheim juga dapat juga digolongkan tindakan korupsi. Istilah korupsi juga dikenakan pada penyalahgunaan uang negara oleh pejabat yang beraca di bawah pengawasannya untuk kepentingan pribadi.

Dari berbagai pola dan bentuknya, sedikitnya terdapat tujuh macam yang termasuk dalam kategori korupsi:

<sup>50</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, Mengenali dan memberantas korupsi, KPK.

<sup>51</sup> Fuad, 1997: 77

- (1) korupsi transaksional yaitu korupsi yang melibatkan dua pihak. Keduanya sama-sama mendapat keuntungan dan karenanya sama-sama mengupayakan secara atraktif terjadinya korupsi;
- (2) korupsi yang bersifat memeras, yaitu apabila pihak pertama harus melakukan penyuapan terhadap pihak kedua guna menghindari hambatan usaha dan pihak kedua itu;
- (3) korupsi yang bersifat otogenik yaitu hanya melibatkan orang yang bersangkutan. Misalnya, seorang anggota parlemen yang mendukung terciptanya sebuah rancangan undang-undang, semata karena undang-undang tersebut akan membawa keuntungan baginya;
- (4) korupsi defensif, yaitu ketika seseorang menawarkan uang suap untuk membela dirinya, seperti menyuap hakim agar hukumannya dikurangi atau dibebaskan;
- (5) korupsi yang bersifat investasi. Misalnya, memberikan pelayanan atau jasa dengan sebaik-baiknya agar nanti mendapat uang "terima kasih" atas pelayanan yang baik tersebut;
- (6) korupsi yang bersifat nepotisme, yaitu penunjukan "orang-orang saja" untuk jabatan-jabatan umum kemasyarakatan, atau "keluarga sendiri" mendapat perlakuan khusus dalam banyak hal;
- (7) korupsi suportif, yaitu korupsi yang tidak secara langsung melibatkan uang, jasa atau pemberian apapun. Misalnya, membiarkan berjalannya.

sebuah tindakan korupsi dan bersikap masa bodoh terhadap lingkungan dan situasi yang korup.

Sebagaimana penampilan kekuasaan, bentuk korupsi pun bermacam-macam. Hal itu terdapat dalam bentuk, mulai dari intimidasi dan pemaksaan kekuasaan yang berakar pada arogansi kekuasaan sampai penggelapan harta negara ataupun masyarakat serta pemberian kesempatan (kekuasaan) bisnis dan posisi untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu saja.

#### **II.16 Penelitian Sebelumnya**

Penelitian mengenai konstruksi tesaurus telah dilakukan oleh beberapa lembaga pendidikan dan lembaga pemerintah, berikut ini adalah beberapa tesaurus berbahasa Indonesia yang telah disusun sebelumnya:

- (1) **Tesaurus Bidang Transmigrasi.** disusun oleh kelompok penyusun tesaurus bidang transmigrasi yang diketuai oleh Ny. Lily K. Somadikarta dengan Mimi Aman, Nazr Nur dan Urip Sutono sebagai anggota kelompok.

Tesaurus ini disusun dalam rangka mempersiapkan pedoman untuk pengelolaan sistem penyimpanan dan temu kembali informasi mengenai transmigrasi di Indonesia. Tesaurus ini diterbitkan oleh JIP FS UI (sekarang PSIP FIB UI) bekerjasama dengan pusat latihan dan penelitian transmigrasi pada tahun 1976.

- (2) **Makrotesaurus.** Merupakan edisi Indonesia dari *Macrothesaurus* yang diterbitkan oleh *Organization of Economic Cooperation and Development* (OECD) pada tahun 1972. penerjemahan ini dilakukan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FE UI (LPEM UI) dengan bantuan keuangan dari *International Development Research Center* (IDRC) di Ottawa sehingga dapat diterbitkan pada tahun 1977.
- (3) **Tesaurus HAM.** Merupakan tesaurus edisi bahas Indonesia dari *Human Rights Thesaurus* yang disusun oleh Ivana Caccia dan diterbitkan oleh *Human Rights Research And Education Center And Human Rights Internet, University of Ottawa* pada tahun 1993. tesaurus ini diterbitkan kembali atas kerjasama Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) dengan Yayasan Majukan Jasa Informasi (YASMIN) pada tahun 2000.
- (4) **Tesaurus Pusat Pembinaan Sumber Daya Manusia.** Tesaurus Pusat Pembinaan Sumber Daya Manusia (PPSM) dibuat berdasarkan *macrothesaurus* OECD edisi bahasa Inggris tahun 1972 dan edisi bahasa Indonesia tahun 1977. tesaurus ini diterbitkan oleh Departemen Dokumentasi dan Riset Pusat Pembinaan Sumber Daya Manusia (YTKI-FES) pada tahun 1978.
- (5) **Tesaurus Bidang Hukum.** disusun oleh Trinarni Hardjo Prakoso dan Ending Tjempaka Sari. Tesaurus ini merupakan pengembangan dari Prakoso dan sari sebagai mahasiswa JIP FS UI pada tahun 1987 dengan bimbingan Ny. L.K. Somadikarta.

(6) **Tesaurus Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, dan Kependudukan.**

(KBKSK). Tesaurus ini diterbitkan oleh Direktorat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi BKBN pusat pada tahun 2001. tesaurus ini merupakan pengembangan dari tesaurus yang sudah pernah ada sebelumnya dengan tujuan mengakomodir berbagai istilah baru akibat dari perkembangan pengetahuan dan kegiatan dibidang ini.

(7) **Tesaurus Islam.** terdapat dua tesaurus Islam, yaitu tesaurus Islam terbitan Pusat Perpustakaan Islam Indonesia (PPII) pada tahun 1986. dan tesaurus Islam terbitan Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI), pada tahun 1995.

